

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Sita Aripurnami/SA, Direktur Eksekutif *Women Research Institute*

Pewawancara: Sunjoyo Jatmiko/SJ

SJ: Apakah Ibu tahu program Sustainable Development Goals (SDGs) dari UNDP?

SA: Tahu

SJ: Sebagai salah satu LSM Indonesia yang bergerak di bidang gender, apakah Ibu tahu bahwa dalam SDGs ada tujuan mengenai kesetaraan gender? Jika iya, apakah WRI sudah menjalankan program-program untuk mewujudkan SDGs?

SA: Iya. WRI sudah menjalankan program-program untuk mewujudkan SDGs. Seperti melakukan penelitian tentang kebijakan-kebijakan dan melihat dampaknya terhadap perempuan; melakukan advokasi dan lobby untuk mendorong partisipasi politik perempuan baik di parlemen atau pengambilan keputusan (target 5 SDGs); melakukan penelitian tentang Angka Kematian Ibu (AKI) dan melakukan advokasi serta lobby utk menurunkan AKI (target ttg Gender dan ttg Kesehatan), dsb.

SJ: Jika sudah dijalankan, menurut ibu apakah program-program tersebut sudah dijalankan dengan efektif?

SA: Belum dijalankan dengan efektif

SJ: Dari 17 tujuan SDGs apakah tujuan 5: kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan yang tidak mudah untuk ditingkatkan?

SA: Ya tidak mudah banyak tantangan yang dihadapi

SJ: Terkait tujuan nomor 5, apa sajakah program-program yang sudah dijalankan WRI guna meningkatkan target nomor 5?

SA: Lihat jawaban nomor 2

SJ: Apakah Ibu tahu mengenai program UNDP seperti; Gender Equality Strategy, Gender Seal Certification Programme, dan Kampanye 16 Days of Activism?

SA: Ya tahu. Kampanye 16 Days of Activism misalnya diadakan untuk memperingati peristiwa pada 25 November, terjadinya penembakan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan di sebuah universitas di Kanada, sehingga banyak yang tewas. Karena, laki-laki tersebut merasa para mahasiswa perempuan itu merebut tempat dia dan banyak laki-laki lain untuk dpt kuliah di universitas tersebut. Sejak itu, setiap tanggal 25 November selalu diperingati sebagai puncak atau gong dari peringatan 16 hari aktivitas menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

SJ: Dari tujuan nomor 5 sebenarnya target dan indikator mana sih bu yang paling sulit untuk dicapai? Dan jika boleh diurutkan, target mana yang paling mudah dicapai hingga paling sulit?

SA: Pada target 5 SDGs, menurut ibu indikator yg paling sulit dicapai adalah indikator kesehatan reproduksi perempuan yang terkait dengan FGM atau Female Genital Mutilation. Karena data yang terkumpul tergenerate dari berbagai penelitian dengan metodologi yang beragam. Selain itu, di Indonesia yang ada adalah sunat perempuan atau circumcission bukan genital mutilation. Sehingga, indikatornya perlu dikembangkan sesuai dengan konteks negara RI. Yang paling mudah adalah mendata kebijakan-kebijakan responsif gender dan yang paling

sulit adalah mendata sunat perempuan di Indonesia karena data yang tersedia seperti yang sudah dijelaskan di atas.

SJ: Melihat stagnansi yang ada sekarang ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh WRI untuk keluar dari stagnansi yang ada bu?

SA: Stagnansi terjadi karena implementasi yang masih tidak optimal serta monitoring yang kurang dan hasil evaluasi yang tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

SJ: Apakah ada kerja sama antara WRI dengan Pemerintah Indonesia atau UNDP Indonesia? Jika ada, diwujudkan dalam hal apa kah kerja sama itu?

SA: Pemerintah RI telah membuat Perpres agar target-target SDGs harus dilaksanakan diseluruh wilayah RI dan setiap tahun masing-masing daerah harus melaporkan progress capaiannya. Dengan begitu diharapkan Indonesia dapat keluar dari stagnansi tsb.

SJ: Apakah ada kerja sama antara WRI dengan Pemerintah Indonesia atau UNDP Indonesia? Jika ada, diwujudkan dalam hal apa kah kerja sama itu?

SA: Ada. Terkait SDGs ada Sekretariat yg didukung UNDP dan dikoordinasikan oleh Bappenas.

SJ: Dan terakhir bu... sejauh ini apakah kerja sama tersebut sudah efektif atau belum? Apa saja kah capaian dan kendala dari kerja sama antara WRI dengan UNDP Indonesia atau Pemerintah Indonesia?

SA: Sudah cukup efektif. Sekretariat ini yang mendorong Prepres sehingga secara de jure ada pijakan hukum dan referensi agar dilaksanakan program-program untuk mencapai target-target SDGs di Indonesia.

Narasumber: Setyo Budiantoro/SB, Perwakilan Sekretariat *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia

Pewawancara: Sunjoyo Jatmiko/SJ

SJ: Apakah Bapak Budi tahu mengenai program Sustainable Development Goals (SDGs) dari UN?

SB: Tahu

SJ: Apakah Bapak Budi tahu bahwa dalam SDGs ada tujuan mengenai kesetaraan gender? Jika iya, apa sajakah program-program yang sudah dilakukan untuk mewujudkan SDGs?

SB: Tahu. Ada banyak sekali jumlahnya. Tetapi dikarenakan bukan kompetensi saya, jadi saya khawatir keliru dalam menjawabnya.

SJ: Jika sudah dijalankan, menurut Bapak Budi apakah program-program tersebut sudah dijalankan dengan efektif?

SB: Sudah cukup efektif.

SJ: Dari 17 tujuan SDGs apakah tujuan 5: kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan yang tidak mudah untuk ditingkatkan?

SB: Iya. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan yang tidak mudah untuk ditingkatkan karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.

SJ: Terkait tujuan nomor 5, apa sajakah program-program dari Indonesia yang sudah dijalankan guna meningkatkan target nomor 5?

SB: Lihat nomor 2

SJ: Apa sajakah landasan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan tujuan SDG nomor 5?

SB: - Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan

- RPJMN 2015-2019

- Nawacita (tetapi nawacita sebenarnya sudah ada dalam RPJMN 2015-2019)

SJ: Apakah Bapak Budi tahu mengenai program UNDP seperti; Gender Equality Strategy, Gender Seal Certification Programme, dan Kampanye 16 Days of Activism juga dilaksanakan di Indonesia?

SB: Ya, program-program tersebut diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia

SJ: Dari tujuan nomor 5 sebenarnya target dan indikator mana yang paling sulit untuk dicapai? Dan jika boleh diurutkan, target mana yang paling mudah dicapai hingga paling sulit?

SB: Lihat nomor 2

SJ: Jika saya lihat dari data yang ada pada UNDP annual report, tujuan nomor 5 mengalami stagnasi, sebenarnya apa yang membuat stagnasi itu terjadi?

SB: Banyak upaya sudah dilakukan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Namun, karena tantangan yang dihadapi sangat banyak, kemajuan yang tercipta masih belum berdampak apa-apa.

SJ: Dan melihat stagnasi yang ada sekarang ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk keluar dari stagnasi yang ada Pak?

SB: Pemerintah Indonesia merupakan salah satu inisiator SDGs dikarenakan pada pertemuan pasca 2015, Indonesia menjadi co-chair, bersama dengan Inggris dan Liberia dalam penyusunan agenda 2030. Berkaitan dengan hal tersebut,

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyusun langkah yang sangat strategis yaitu dimana pelaksanaan SDGs secara nasional dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Tetapi, Pemerintah Pusat juga dibantu oleh Gubernur yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan menggaet bupati dan walikota yang ada dibawahnya dan menghimbau daerah tersebut untuk melaksanakan nilai-nilai SDGs.

SJ: Apakah ada kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP

Indonesia? Jika ada, diwujudkan dalam hal apa kah kerja sama itu?

SB: Sudah ada. Yang dilakukan UNDP terkait kerjasama SDGs cukup banyak, dari mendukung Sekretariat SDGs, penyusunan VNR, memfasilitasi beberapa provinsi membuat Rencana Aksi Daerah, membuat SDGs Academy, membuat SDGs financing lab, dll

SJ: Dan terakhir... sejauh ini apakah kerja sama tersebut sudah efektif atau belum? Apa saja kah capaian dan kendala dari kerja sama antara UNDP Indonesia dengan Pemerintah Indonesia?

SB: Cukup efektif, namun karena tantangan yang dihadapi sangat banyak, tentu itu tidak cukup & butuh dukungan banyak pihak. Pada dasarnya pencapain SDGs harus melibatkan banyak pihak & inklusif. karena Indonesia masuk middle income country, resource UNDP untuk Indonesia makin terbatas. ini yang menyebabkan support dari UNDP tidak bisa seperti dahulu.

Narasumber: Nona Gae Luna/NGL, Perwakilan Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

Pewawancara: Sunjoyo Jatmiko/SJ

SJ: Apakah Ibu tahu mengenai program Sustainable Development Goals (SDGs) dari UNDP?

NGL: Ya, seperti Program Lokalisasi SDGs, baik di tingkat kebijakan, advokasi, pembangunan kapasitas maupun di tingkat lokal. Program tersebut fokus pada SDG1, yaitu pengentasan kemiskinan.

SJ: Apakah Ibu tahu bahwa dalam SDGs ada tujuan mengenai kesetaraan gender? Jika iya, apa sajakah program-program yang sudah dilakukan untuk mewujudkan SDGs?

NGL: Iya, kami tahu adanya tujuan terkait kesetaraan gender di dalam SDGs, yaitu Goal 5 dengan 9 target di bawahnya.

SDG ini menekankan perlunya mengangkat kesetaraan gender sebagai hal yang universal dan diperjuangkan oleh semua pihak. Perjuangan mencapai kesetaraan gender bukan hanya menjadi kepentingan perempuan, namun juga kepentingan laki-laki dalam membangun kemitraan yang setara dengan perempuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Program-program yang telah dilakukan oleh Indonesia akan lebih tepat ditanyakan kepada instansi *focal point* SDGs, yaitu Bappenas. Namun secara umum, dapat kami sampaikan beberapa langkah yang telah diambil pemerintah adalah sebagai berikut:

- Advokasi untuk menentang *harmful practices* perempuan dan anak perempuan

Dalam hal ini, mengingat praktek *child marriage* masih sering ditemukan di Indonesia, data menunjukkan bahwa usia median seorang perempuan untuk menikah pertama kalinya telah meningkat dari 17.1 tahun pada tahun 1991 menjadi 21.8 tahun pada tahun 2017.

- Peningkatan keterwakilan perempuan di badan parlemen

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, telah ditetapkan kuota sebesar 30% untuk perempuan di DPR. Dari Pemilu 2019, sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 telah dilantik. Terdapat 118 perempuan di antaranya atau 20,52% dari total jumlah. Jumlah ini memang belum mencapai 30% sebagaimana yang ditetapkan UU, namun terdapat peningkatan dari periode sebelumnya, yaitu dari 97 (17,3% dari total kursi).

Dalam hal ini, peningkatan jumlah perempuan di DPR juga perlu terus diupayakan bersama dengan peningkatan kualitas anggota DPR.

- Peningkatan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan lembaga pemerintahan

Posisi perempuan sebagai eselon II (direktur) di lembaga pemerintahan meningkat dari 8,30% di tahun 2011 menjadi 13,06% di tahun 2017. Sementara sebagai eselon I (direktur jenderal atau sekretaris jenderal), meningkat dari 9,17% di tahun 2011 menjadi 15,21% di tahun 2017.

Untuk ke depannya, pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana aksi terkait isu ini yang bertujuan untuk:

- meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di dalam pembangunan;

- meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan berbagai aksi kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- meningkatkan kapasitas institusi dalam hal pengarusutamaan gender;
- meningkatkan perhatian pada kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam mematangkan usia siap nikah; dan
- meningkatkan *public awareness* mengenai pentingnya peran dan fungsi keluarga.

Kementerian Luar Negeri sendiri memperjuangkan kesetaraan gender, baik dalam lingkungan kementerian, maupun dalam perumusan kebijakan luar negeri. Dari tahun ke tahun, presentase jumlah CPNS yang direkrut oleh Kemlu sudah mencapai keseimbangan gender (*gender balance*). Perempuan mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk meniti karir, menempuh pendidikan, dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas profesionalnya di Kementerian Luar Negeri.

Kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh Kemlu juga mengangkat pentingnya pengakuan terhadap hak perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, seperti dalam pembahasan isu-isu terkait pemajuan peran perempuan, pencegahan kekerasan terhadap migran perempuan dan peran *peacekeeper* perempuan dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

SJ: Jika sudah dijalankan, menurut ibu apakah program-program tersebut sudah dijalankan dengan efektif?

NGL: Efektif atau tidaknya, kemungkinan masih membutuhkan waktu. Namun komitmen Pemerintah untuk sudah terlihat melalui pembuatan kebijakan yang pro kesetaraan gender.

SJ: Dari 17 tujuan SDGs apakah tujuan 5: kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan yang tidak mudah untuk ditingkatkan?

NGL: Dalam pandangan kami, untuk mencapai kemajuan di Tujuan 5, diperlukan perubahan *mindset* dan aksi nyata dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga, sampai di tingkat pemerintah. Melihat contoh-contoh kemajuan pada jawaban nomor 2, kami optimis kemajuan pada Tujuan 5 dapat tercapai meskipun secara bertahap.

SJ: Terkait tujuan nomor 5, apa sajakah program-program dari Indonesia yang sudah dijalankan guna meningkatkan target nomor 5?

NGL: Dapat dirujuk pada no. 2.

SJ: Apa sajakah landasan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan tujuan SDG nomor 5?

NGL: UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

SJ: Apakah Ibu tahu mengenai program UNDP seperti; Gender Equality Strategy, Gender Seal Certification Programme, dan Kampanye 16 Days of Activism juga dilaksanakan di Indonesia bu?

NGL: Sejauh ini, saya baru mendengar kampanye 16 days of activism dan Gender Seal Certification Programme

SJ: Dari tujuan nomor 5 sebenarnya target dan indikator mana sih bu yang paling sulit untuk dicapai? Dan jika boleh diurutkan, target mana yang paling mudah dicapai hingga paling sulit?

NGL: Kemungkinan target “*eliminate harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation*” adalah target yang sulit dicapai sepenuhnya karena aspek *local values* yang masih kuat.

Namun masing-masing target ini sulit dicapai karena membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

SJ: Jika saya lihat dari data yang ada pada UNDP annual report, tujuan nomor 5 mengalami stagnansi, sebenarnya apa yang membuat stagnansi itu terjadi?

NGL: Banyak hal dapat menyebabkan stagnansi pada pencapaian SDGs, antara lain:

- pemahaman nilai lokal atau agama tertentu, atau
- upaya yang belum melibatkan semua pihak, dan
- *judgment* yang menganggap isu kesetaraan gender hanya sebatas isu perempuan.

SJ: Dan melihat stagnansi yang ada sekarang ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk keluar dari stagnansi yang ada bu?

NGL: Pemerintah, bukan hanya di tingkat Pusat, namun juga di tingkat lokal, perlu menjalin kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan guna mensoalisasikan pentingnya kesetaraan gender.

Selain itu, Pemri perlu mendorong keterwakilan, keterlibatan, dan kepemimpinan perempuan di berbagai organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.

SJ: Apakah ada kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP Indonesia?

Jika ada, diwujudkan dalam hal apa kah kerja sama itu?

NGL: Ada, UNDP telah menjadi mitra Pemri sejak lama.

Bentuk kerja sama, terkait SDGs, salah satunya melalui Project Initiation Plan (PIP), sebuah program lokalisasi SDGs di tingkat nasional dan sub-nasional.

SJ: Dan terakhir bu... sejauh ini apakah kerja sama tersebut sudah efektif atau belum? Apa saja kah capaian dan kendala dari kerja sama antara UNDP Indonesia dengan Pemerintah Indonesia?

NGL: Sepertinya cukup efektif. Melalui kegiatan di atas, kemitraan Pemri dan UNDP dalam bentuk advokasi, penguatan kebijakan dan institusi, penguatan sistem data, pembangunan kapasitas, serta strategi promosi dan komunikasi untuk sosialisasi SDGs.

UNDP bisa membantu Pemerintah Indonesia dalam menjangkau kelompok masyarakat di pelosok maupun mereka yg apriori terhadap pendekatan pemerintah.